

**PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN TOWER
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 15
TAHUN 2013 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG**

**M Fadli Nasser¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H.,M.H¹, Drs. Suparman
Khan M.Hum¹**

**¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail : muhammadfadli9490@gmail.com**

Abstrak

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang. Menurut pengamatan penulis, bahwa di Kota Padang dibangun menara-menara telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan pengembangan telekomunikasi tersebut, akan tetapi tidak semua menara telekomunikasi yang dibangun di Kota Padang memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dari Komunikasi dan Informatika. Metode yang digunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdapat data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian yaitu: (1). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Tugas dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dalam memberikan izin pendirian Menara Telekomunikasi didekat pemukiman warga harus ada izin prinsip untuk pembangunan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) (2). Kendala-kendala atau hambatan terhadap pendirian tower di kota padang menurut peraturan walikota padang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang yakni kurangnya kordinasi antara pihak pemberi izin dengan perangkat pemerintah daerah. (3) Dampak kerugian terhadap masyarakat disekitar pendirian Menara Telekomunikasi antara lain Kerusakan infrastruktur, Kekhawatiran masyarakat akan robohnya Menara Telekomunikasi, dan sebagainya.

Kata kunci: Penataan Ruang Kota, Menara Telekomunikasi, Izin Pendirian.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan lahir dan bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :**“PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG DALAM MEMBERI IZIN PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG”** Kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta Padang.

Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H., selaku Pembimbing I (Sekaligus sebagai Tata Kelola dan Bidang Hukum Universitas Bung Hatta) dan Bapak Drs. Suparman Khan M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Zarfinal S.H.,MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Yetisma Saini S.H., MH. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Staf dan Jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota Padang yang telah memberi penulis banyak kemudahan selama proses penelitian.
7. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua penulis Alm. NasiruddinS.Sos (Papa) dan ZulyasmiS.Pd, (Mama) terima kasih doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tulus dan ikhlas serta kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Buat saudara-saudara penulis Vicko Brilliantino Nasser S.Sos (Kakak), Vicky Satria Nasser (Kakak) dan Riny Septia Pratiwi S.Pd (Pengisi Hati) terima kasih atas dukungannya.
9. Buat teman-teman seperjuangan angkatan 2013. BTS family dan Inyak Warrior terima kasih atas dukungannya serta Muhammad Iqbal S.H, Teguh Adrian S.H, Mukhwin Hakimi S.H, terima kasih atas wejangannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Buat rekan-rekan ceperist dan rekan-rekan scoterist selama kuliah khususnya Reynaldo, Rahmad, Dharma Hidayatullah, Burhanudin S.H, Brian Fieto Gemi dan Ikhsan Hidayat, Thoyibat Shani S.H terima kasih atas dorongan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dalam penulisan skripsi ini terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, amin ya rabbal alamin.

Padang, 16 Agustus 2018
Penulis,

M Fadli Nasser
1310012111216

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Metode Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Izin dan Perizinan	16
1. Pengertian Izin.....	16
2. Pengertian Perizinan.....	17
3. Klasifikasi Izin	19
4. Tujuan dan Fungsi Izin.....	22
5. Bentuk-Bentuk Perizinan	24
B. Tinjauan Umum Tentang Menara Telekomunikasi	26
1. Pengertian Menara Telekomunikasi.....	26
2. Asas-asas Manfaat Pendirian Menara Telekomunikasi	29
3. Fungsi Menara Telekomunikasi.....	29
4. Macam-Macam Bentuk Menara Telekomunikasi	31
C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Walikota	32
1. Pengertian Peraturan Walikota	32
2. Fungsi Pada Peraturan Walikota	36

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota Padang dalam Memberikan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi Didekat Pemukiman Warga	43
B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota Padang dalam Penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang	50
C. Dampak Kerugian Masyarakat Yang Berada Disekitar Pendirian Menara Telekomunikasi Di Kota Padang	50

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan	53
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA